

STUDI DAMPAK FINANCIAL INCLUSION DALAM KERANGKA APEC UNTUK SEKTOR NON-BANK TERHADAP PEREKONOMIAN DAN DAYA SAING DOMESTIK

Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) mengusulkan inisiatif keuangan inklusif (*Financial Inclusion Initiative*) pertama kali di tahun 1992 dengan tujuan untuk meningkatkan akses lembaga keuangan ke seluruh masyarakat negara anggota APEC dihadapkan pada *existing condition* akses terhadap lembaga keuangan sangat beragam. Umumnya masyarakat Negara-negara maju memiliki akses yang lebih baik terhadap sektor keuangan dibandingkan dengan negara berkembang. Kesimpulan tersebut didasarkan pada rendahnya *outcome performance* Negara berkembang pada beragam indikator, meliputi: persentase populasi dari orang dewasa di negara yang dapat mengakses layanan keuangan, perhitungan jumlah rekening pinjaman dan deposito per kapita, akses untuk mengajukan pinjaman, besar jumlah pinjaman minimum, biaya administrasi, fasilitas layanan pembayaran, serta pengiriman internasional.

Urgensi atas sistem keuangan yang inklusif dewasa ini didasari oleh pemikiran untuk memberikan pemerataan kesempatan bagi semua orang dalam mendapatkan layanan keuangan. Merujuk pada hal tersebut, beberapa tujuan penting yang akan difokuskan pada kajian ini meliputi: (1) Mendeskripsikan kerja sama sektor keuangan; (2) Membangun database dan struktur model *Financial Social Accounting Matrix* (FSAM) (3) Menganalisis dampak *financial inclusion* dalam kerangka APEC untuk sektor non-bank terhadap perekonomian dan daya saing domestik.

Sekitar 40 persen masyarakat Indonesia belum mempunyai akses terhadap lembaga keuangan. Bank komersial yang mendominasi sektor keuangan di Indonesia (80 persen) hanya menjangkau sebagian kecil dari seluruh total penduduk. Masih rendahnya kemampuan dalam mengakses layanan keuangan menjadi indikasi bahwa perlunya *framework* strategi nasional *financial inclusion*. Aplikasi *Financial Inclusion Initiative* yang telah disesuaikan dan dilakukan oleh Indonesia meliputi: (1) Penetapan sektor perbankan sebagai *backbone*. Dimana Bank mendominasi sektor keuangan dan diupayakan untuk terus memperkuat dan memperlebar bank-bank cabang. (2) Sinergi diantara perbankan, lembaga keuangan non bank, termasuk lembaga keuangan mikro (*micro finance institution*/MFI). (3) Inovasi dalam jalur distribusi seperti Agen perbankan di kantor pos, pegadaian, atau pada pedagang eceran (*retail*).

Pembangunan database dan struktur model *Financial Social Accounting Matrix* (FSAM) dilakukan untuk scenario *Financial Inclusion* Sektor Non-Bank. Pendekatan FSAM (*Financial Social Accounting Matrix*) secara garis besar diperoleh mengintegrasikan NAD (Neraca Arus Dana) dan dengan sistem data SAM (*Social Accounting Matrix*). Data FSAM yang digunakan dalam penelitian ini adalah data FSAM 2005 dimana akan dilakukan disagregasi lembaga keuangan non bank (LKNB) menjadi lembaga asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan pegadaian.

Financial Inclusion dalam Forum APEC

Terdapat persamaan antara upaya-upaya kerjasama di bidang keuangan internasional dengan upaya-upaya kerjasama di bidang perdagangan internasional. Dibidang perdagangan internasional terdapat prakarsa pada tingkat multilateral untuk memperkuat sistim perdagangan internasional, yaitu agar akses pasar meningkat secara global (menuju global free trade) dan terdapat kepastian dan stabilitas dalam akses tersebut untuk semua pesertanya (fair trade). Proses perundingan internasional dalam kerangka WTO yang dikenal sebagai Doha Round atau Doha Development Agenda (DDA) mengalami berbagai hambatan sehingga proses itu hampir terhenti (Pertemuan Menteri di Seattle dan di Cancun). Proses pada tingkat multilateral ini sulit dan lambat, antara lain karena melibatkan jumlah Negara yang banyak dengan berbagai kepentingan yang berbenturan. Oleh karena itu, sejumlah negara atau kelompok negara mengambil langkah untuk melakukan kerjasama secara regional atau bahkan secara bilateral. Maka kini ruang diplomasi perdagangan internasional dipadati oleh berbagai prakarsa regional (RTAs atau regional trading arrangements) dan bilateral (bilateral FTAs. free trade agreements). Negara seperti Amerika Serikat, tetapi juga Singapura dan Thailand, menerapkan strategi yang melibatkan upaya di semua tingkatan (multi-tier strategy): multilateral/global, regional, dan bilateral dalam upaya mereka untuk memperbesar akses pasar dan meningkatkan kepastian akses tersebut. Tetapi negara-negara ini dalam retorikanya menyatakan bahwa upaya-upaya regional dan bilateral itu dimaksudkan sebagai batu loncatan atau building blocks bagi tercapainya global free trade.

APEC, misalnya, mempolakan agenda perdagangannya tidak hanya untuk merealisasikan apa yang disebut .free and open trade in the region. tetapi juga untuk memperkuat sistim perdagangan internasional (WTO). Prakarsa regional APEC bukan untuk membentuk suatu kerjasama perdagangan yang diskriminatif, seperti NAFTA atau EU, tetapi mengembangkan apa yang disebut .open regionalism melalui modalitas .concerted unilateral (trade and investment) liberalization serta upaya-upaya fasilitasi dan kerjasama ekonomi dan teknikal.

Di bidang kerjasama keuangan internasional juga terdapat sejumlah prakarsa pada tingkat multilateral dan regional serta bilateral. Di tingkat global/multilateral telah dilontarkan gagasan mereformasi arsitektur keuangan global/internasional (international financial architecture) atau membentuk suatu arsitektur yang baru. Tujuan utama kerjasama keuangan internasional adalah untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas keuangan. Dari perspektif pembangunan (negara-negara berkembang) sebenarnya suatu arsitektur keuangan internasional juga harus dapat menjamin peningkatan akses pada sumber daya keuangan, termasuk akses pada likuiditas internasional pada saat menghadapi atau dalam upaya mengatasi suatu krisis ekonomi finansial. Upaya-upaya di tingkat multilateral/global tidak banyak mengalami kemajuan. Bahkan reformasi arsitektur keuangan internasional tidak lagi menjadi agenda utama.

Dalam kerangka kerjasama APEC, financial inclusion umumnya berkaitan dengan kegiatan microfinance. Pembahasan tentang hubungan antara financial inclusion dan microfinance pertama kali dilakukan ketika Meksiko menjadi ketua APEC pada tahun 2002. Meksiko pada saat itu berinisiatif untuk melakukan pembahasan mengenai micro-banking dan microenterprise dalam kerangka APEC Economic Committee dan menteri-menteri yang membawahi masalah perusahaan kecil dan menengah atau SME (small medium enterprise). Pembahasan ini menghasilkan

kesepakatan mengenai peran microfinance dalam perkembangan perusahaan kecil dan menengah.

Terkait dengan financial inclusion dan kegiatan microfinance pertemuan Menteri Keuangan negara-negara APEC di Phuket, Thailand pada tanggal 4-5 September 2003 bertemakan "Local/Regional Link, Global Reach: A New APEC Financial Cooperation dengan sub tema Grass-Roots and Small and Medium Enterprises (SMEs) Development, Regional Bond Market Development, and Fiscal and Financial Aspects of Regional Trade Arrangements. Pada pertemuan tersebut disepakati pentingnya mempromosikan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka melalui multilateral system dan kerjasama regional dan bilateral yang dikombinasikan dengan menguatkan peraturan perdagangan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan dunia.

Pada pertemuan Menteri Keuangan negara-negara APEC pada tanggal 5-6 November 2010 menyepakati APEC Financial Inclusion Initiative yang bertujuan untuk meningkatkan akses lembaga keuangan ke seluruh masyarakat negara anggota APEC. Financial inclusion ini dilakukan dengan memberdayakan lembaga microfinance terutama di daerah pedesaan. Dalam beberapa pertemuan tersebut disepakati dalam kerangka APEC bahwa financial inclusion adalah tujuan kebijakan (policy goal) dengan instrumennya melalui microfinance.

Keadaan negara APEC mengenai akses terhadap perbankan sangat beragam. Umumnya masyarakat Negara-negara maju memiliki akses terhadap perbankan lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang.

Dengan beragamnya keadaan financial inclusion di antara negara-negara APEC, dapat dijadikan keuntungan karena negara yang masih rendah akses terhadap perbankan dapat belajar terhadap negara yang akses terhadap perbankannya sudah tinggi seperti Kanada dan Amerika Serikat. Selain terkait dengan microfinance, financial inclusion dapat dilakukan dengan terbukanya sektor finansial dari masing-masing negara APEC. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Menteri Keuangan negara APEC yang memprioritaskan reformasi sektor keuangan dan capacity building. Dengan masuknya dana-dana dari negara APEC tersebut, maka dapat berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap jasa keuangan karena semakin banyaknya dana atau pilihan untuk berinvestasi.

Perkembangan terakhir terkait financial inclusion, APEC Financial Inclusion Workshop telah diselenggarakan di San Fransisco, Amerika Serikat pada tanggal 23-24 Februari 2011. Workshop tersebut dihadiri oleh 20 Ekonomi Anggota APEC (Papua New Guinea berhalangan hadir), perwakilan APEC Business Advisory Council (ABAC), dan perwakilan organisasi keuangan internasional, antara lain International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), CGAP (Consultative Group to Assist the Poor), dan Alliances for Financial Inclusion (AFI), serta perwakilan dari perusahaan swasta antara lain Citi Foundation dan Mastercard.

Workshop ditujukan untuk menyampaikan guidance yang bersifat konkret dan praktikal bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan penggunaan jasa keuangan oleh rumah tangga, perseorangan, wiraswasta, sehingga strategi kebijakan financial inclusion diharapkan dapat disesuaikan/ tailor made sesuai dengan kebutuhan masing-masing ekonomi.

Metode Analisis Efek Pengganda Neraca

Analisis Efek Pengganda Neraca ini digunakan untuk melihat dampak yang ditimbulkan oleh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Seperti pada tabel SNSE, dimana aliran penerimaan dan pengeluaran dinyatakan dalam satuan miliar rupiah (moneter) yaitu dapat ditunjukkan oleh matriks transaksi T (matriks transaksi antar peubah endogen) dan dalam SNSEF juga berlaku hal yang sama.

Pada setiap bagian dalam matriks T dibagi dengan jumlah kolom maka akan didapatkan matriks baru yang menunjukkan besar kecenderungan rata-rata (average expenditure propensity) yang dinyatakan dalam bentuk proporsi. *Average expenditure propensity* digunakan sebagai penyusun matriks analisis efek berganda. Matriks baru hasil perhitungan kecenderungan pengeluaran rata-rata tersebut dapat disebut dengan matriks A, dengan unsur-unsurnya A_{ij} yaitu hasil dari pembagian nilai T pada baris i dan kolom j (T_{ij}), sehingga dapat dirumuskan menjadi:

$$A_{ij} = T_{ij} \widehat{Y_j^{-1}} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

A_{ij} = Kecenderungan pengeluaran rata-rata pada baris ke-i kolom ke-j

T_{ij} = Nilai neraca pada baris ke-i kolom ke-j

$\widehat{Y_j^{-1}}$ = Jumlah total pengeluaran pada kolom ke j

Dalam persamaan diatas, $\widehat{Y_j^{-1}}$ merupakan matriks diagonal dari penjumlahan kolom, sedangkan merupakan suatu matriks dengan unsur-unsur konstan sehingga matriks dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A_{23} \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} \dots\dots\dots(2)$$

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{bmatrix} \dots\dots\dots(3)$$

Sehingga persamaan matriks diatas dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y=AY+X, \text{ atau} \dots\dots\dots(4)$$

$$Y-AY=X \dots\dots\dots(5)$$

$$Y = (I - A)^{-1}X \dots\dots\dots(6)$$

Jika $M_a = (I - A)^{-1}$ Maka:

$$Y = M_a X \dots\dots\dots(7)$$

Dimana:

Y = Perubahan pendapatan (Neraca Endogen)

M_a = Pengganda neraca Total

X = Neraca Eksogen

Model tersebut menjelaskan bahwa setiap perubahan neraca eksogen (X) akan menyebabkan perubahan terhadap neraca endogen (Y) sebesar M_a . Dalam persamaan (3) berisi koefisien-koefisien yang menunjukkan pengaruh langsung dari perubahan yang terjadi di suatu sektor terhadap sektor lainnya. Sedangkan untuk accounting multiplier atau (M_a) adalah suatu pengganda yang menunjukkan besarnya pengaruh perubahan pada sektor terhadap sektor lainnya setelah melalui sistem FSNSE secara keseluruhan. Dalam persamaan tersebut, nilai X dalam penelitian ini adalah impor, kapital, pajak tidak langsung dan subsidi instrumen finansial, dan luar negeri. Sedangkan nilai Y dalam penelitian ini meliputi faktor produksi, institusi dan aktivitas produksi.

Kerangka Pemikiran

Data FSAM yang digunakan dalam penelitian ini adalah data FSAM 2005 dimana akan dilakukan disagregasi lembaga keuangan bukan bank (LKBB) menjadi lembaga asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan dan pegadaian. Disaggregasi dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian.

Disaggregasi tersebut menghasilkan informasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran yang diterima oleh institusi di luar negeri (sel LUAR NEGERI) sebesar Rp. 101,35 miliar yang berasal dari lembaga asuransi. Data keuangan dari industri keuangan non bank yang diterima oleh pihak asing tidak ada atau 0. Informasi ini mengindikasikan adanya *capital outflow/remittance* ke luar negeri dari lembaga asuransi yang dimiliki investor asing (informasi berasal dari negara mana belum diperoleh).
- b) Di lajur Penerimaan terdapat nilai sebesar Rp. 431,63 miliar yang menunjukkan adanya kepemilikan asing (negara sumber investasi tidak diperoleh). Data FSAM 2005 hanya menginformasikan kepemilikan asing di lembaga asuransi. Secara teoritis kenaikan proporsi asing hanya terbatas pada industri ini dan transmisi perubahannya relatif kecil. Namun opsi atau simulasi lain berupa peningkatan investasi pihak asing atau negara APEC dilakukan dengan pemberian “angka baru” pada bagian LUAR NEGERI di baris PENERIMAN untuk industri pegadaian, pembiayaan dan dana pensiun. Seolah-olah ada “industri keuangan non bank” baru yang dimiliki oleh negara lain.
- c) Simulasi lain yang mungkin adalah peningkatan kepemilikan asing di instrumen keuangan. Di satu pihak modal asing akan meningkatkan likuiditas di dalam negeri. Di pihak lain akan meningkatkan capital outflow karena return yang diterima pihak asing atas dana yang mereka tempatkan di pasar modal atau lembaga keuangan lainnya.
- d) Jika melihat kecilnya nilai sel LUAR NEGERI pada lembaga keuangan non bank terhadap aset lembaga keuangan bank, maka dapat diduga dampak terhadap ekonomi yaitu perubahan daya saing industri dan pendapatan rumah tangga juga akan kecil. Namun hipotesa ini akan diuji dari simulasi model.

Skenario Pertama *Financial Inclusion* dalam Kerangka APEC untuk Sektor Non-Bank terhadap Perekonomian dan Daya Saing Domestik dilakukan dengan simulasi teknis berupa peningkatan transfer dana luar negeri dari Negara Anggota APEC

terhadap institusi LKNB Indonesia yakni Asuransi. Dengan masuknya dana-dana dari negara APEC tersebut, maka diprediksikan akan semakin banyaknya dana atau pilihan masyarakat untuk berinvestasi sehingga diharapkan berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap jasa keuangan.

Institusi asuransi Indonesia secara "*nature*" merupakan institusi keuangan dengan karakteristik terfragmentasi dan mempunyai pangsa pasar yang kecil. Asuransi secara umum belum memainkan peran penting dalam meningkatkan akses ke jasa keuangan di antara mereka yang berpenghasilan rendah. Dari sisi penawaran, kendala yang dihadapi adalah persepsi pasar keuangan yang bersifat konvensional dan melihat bahwa orang miskin dan berpenghasilan rendah bukan merupakan target klien yang potensial. Kendala lain adalah tidak adanya lembaga keuangan formal asuransi di dekat kawasan pedesaan serta LKNB konvensional dengan skala menengah dan mikro belum dikenal dan menjadi pemain utama di pasar keuangan *low end*. Dari sisi permintaan, banyak orang miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak mampu untuk menanggung biaya efektif tinggi yakni keseluruhan biaya yang tercakup dalam menggunakan jasa keuangan formal serta rendahnya tingkat literasi secara signifikan memberikan kontribusi pada terbatasnya akses keuangan LKNB.

Besarnya *shock* yang akan disimulasikan untuk mengetahui bagaimana perubahan premi asuransi perusahaan *joint venture* Usaha Asuransi Kerugian dan Reasuransi, Asuransi Jiwa, Asuransi Jiwa Syariah, serta Pialang Asuransi dan Reasuransi yang berasal negara APEC adalah sebesar Rp. 7,3 Trilyun.

Respon terbesar akibat dari *shock* di lembaga asuransi adalah komoditas domestik untuk sektor bangunan, keuangan dan industri pengolahan. Komoditas domestik untuk sektor bangunan dan industri pengolahan non migas mendapatkan *shock* terbesar karena terdapat transfer kapital dari lembaga asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas domestik pada sektor bangunan dan industri pengolahan mempunyai kaitan yang erat dengan lembaga asuransi. Sedangkan komoditas pada sektor keuangan mendapatkan dampak yang besar karena kaitannya dengan komoditas sektor bangunan melalui jasa sewa properti yang merupakan sub sektor keuangan (Bank Indonesia, 2009).

Efek dari peningkatan produktivitas di sektor riil tersebut akan berdampak pada peningkatan permintaan input tenaga kerja khususnya terhadap rumah tangga tidak miskin di pedesaan dan rumah tangga miskin di perkotaan. Umumnya masyarakat tidak miskin di pedesaan bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan masyarakat miskin di perkotaan bekerja sebagai buruh di pengolahan non migas. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan didominasi oleh rumah tangga pedesaan tidak miskin dan rumah tangga perkotaan yang miskin. Transmisi ke pendapatan rumah tangga terjadi melalui interaksi di pasar tenaga kerja yaitu penerimaan upah dan gaji ke rumah tangga.

Skenario Kedua *Financial Inclusion* dalam Kerangka APEC untuk Sektor Non-Bank terhadap Perekonomian dan Daya Saing Domestik diproksi melalui peningkatan akses masyarakat golongan miskin dan menengah terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Konsep Financial Inclusion tidak hanya terfokus pada aksesibilitas untuk menabung tapi juga meminjam. Di Indonesia, *financial inclusion* sudah dipraktikkan melalui kredit usaha rakyat (KUR). KUR adalah satu bentuk *financial inclusion* karena debitur yang dijamin tidak layak secara perbankan (*unbankable*).

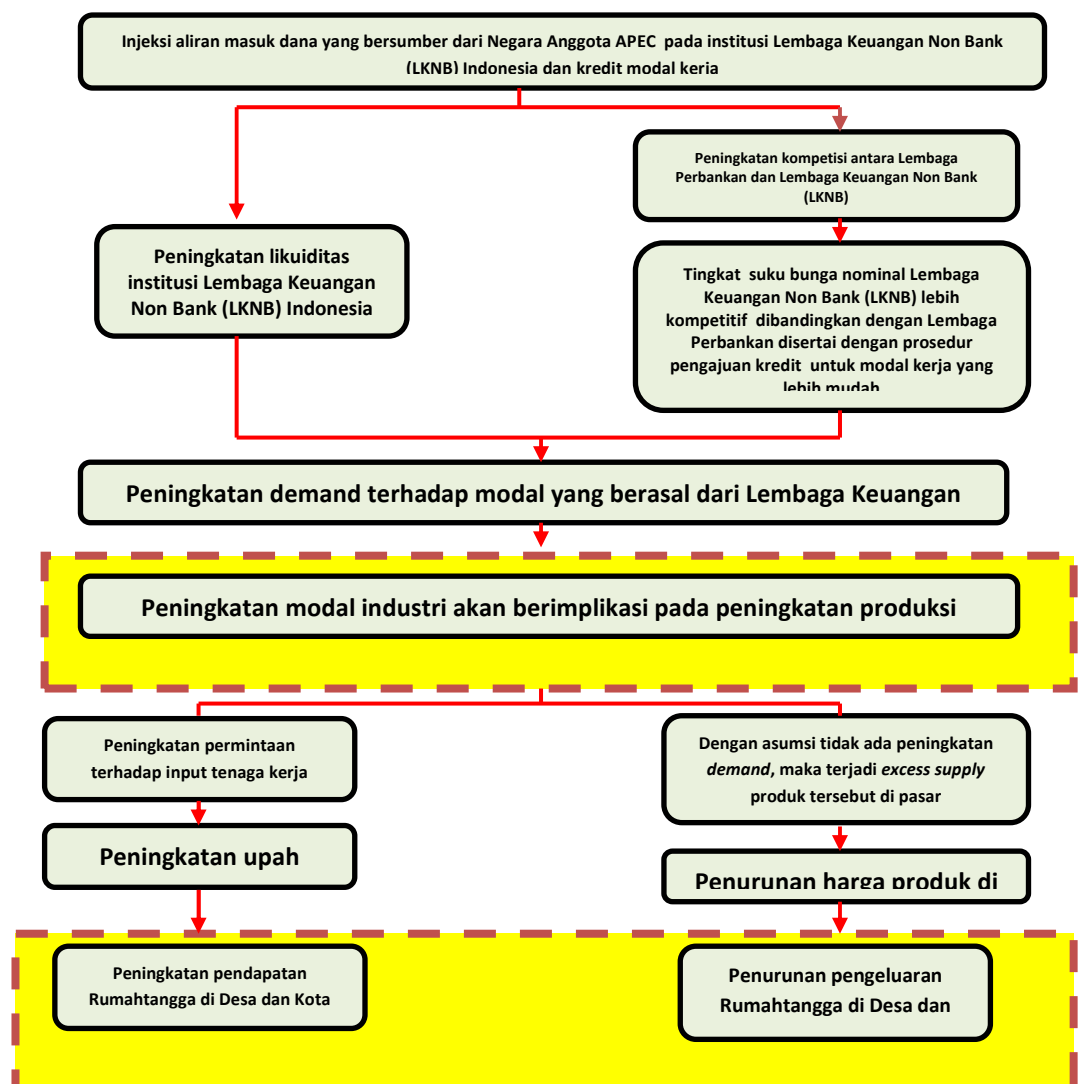
Dampak shock pada kredit modal kerja sebesar 27 trilyun masing-masing pada faktor produksi, rumah tangga dan sektor produksi domestik. Dampak terbesar

shock pada kredit modal kerja pada faktor produksi terjadi di faktor produksi bukan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi lebih bersifat *capital intensive*.

Pada sektor produksi domestik, dampak shock pada kredit modal kerja terbesar adalah pada sektor industri pengolahan bila dilihat dari sisi nilai sedangkan persentase peningkatan terbesar dialami oleh sektor bangunan. Peningkatan pada sektor industri pengolahan menunjukkan penyaluran kredit modal kerja lebih banyak pada sektor ini. Sedangkan dampak pada sektor bangunan dapat dijelaskan bahwa penyaluran kredit modal kerja digunakan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sektor bangunan seperti pembangunan rumah, pabrik dan lain-lain. Sedangkan untuk sektor pertanian juga berdampak besar akibat peningkatan kredit modal kerja karena salah satu sektor yang diprioritaskan untuk kredit modal kerja adalah sektor pertanian.

Salah satu implikasi yang penting dari dampak perubahan premi perusahaan *joint venture* asuransi negara APEC terhadap komoditas domestik sektor keuangan, bahwa peran sektor keuangan khususnya non bank tetap strategis untuk ditingkatkan karena mampu menghasilkan *spillover* yang positif terhadap kegiatan investasi secara keseluruhan. Dalam hal ini pengembangan sektor keuangan tersebut perlu memperhatikan akses yang lebih luas pada seluruh kelompok masyarakat sehingga dampak negatif dari segmentasi aksesibilitas sektor keuangan dapat diminimalkan.

Skema Chaneling Dampak Inisiatif APEC Financial Inclusion terhadap Peningkatan Daya saing Industri dan Kesejahteraan Rumah Tangga



Komitmen negara-negara APEC meningkatkan keterjangkauan keuangan masyarakat terhadap produk keuangan memerlukan serangkaian dukungan kelembagaan pemerintah, insentif, industri perbankan dan juga organisasi-organisasi masyarakat. Beberapa alternative kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian lembaga keuangan non bank khususnya perusahaan asuransi lebih terekspos oleh rumah tangga tidak miskin di desa maupun di kota atau lebih dikenal sebagai kelas menengah. Sehingga apabila ingin memperkuat kelas menengah di desa maupun di kota maka financial inclusion terutama di sektor asuransi akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Informasi tentang manfaat, prosedur dan segala hal mengenai asuransi perlu diperkenalkan kepada mereka lebih intensif lagi. Dari penguatan kelas menengah yang pada umumnya lebih berpendidikan, diharapkan adanya *trickle down effect* dari mereka kepada kelas bawah baik di desa maupun di kota.
2. Hasil penelitian juga menunjukkan sektor industri pengolahan dan bangunan merupakan sektor yang mempunyai dampak terbesar akibat adanya shock pada sektor asuransi walaupun dampaknya secara tidak langsung. Transmisinya adalah pada sektor industri pengolahan melalui rumah tangga terutama rumah tangga tidak miskin di kota sedangkan sektor bangunan melalui perusahaan bukan keuangan. Hal ini menunjukkan penguatan kalangan menengah di kota maupun di desa dapat menguatkan eksistensi industri pengolahan. Industri pengolahan ini juga mempunyai linkage yang cukup besar dari sektor lainnya terutama dari sektor primer seperti pertanian. Jadi penguatan perusahaan asuransi tidak hanya mempengaruhi kalangan menengah kota dan desa namun juga dapat menguatkan industri pengolahan maupun pertanian. Hal ini akan memberikan multiplier effect pada sektor lain sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan aktivitas perekonomian dan daya saing domestik
3. Kebijakan pemerintah melalui pelayanan asuransi sosial dan safe-net. Implikasi kebijakan ini didasarkan pada fenomena bahwa peningkatan akses produk asuransi ke masyarakat berpendapatan rendah tidak dapat menggunakan mekanisme pasar (price-mechanism). Intervensi pemerintah sangat diperlukan karena jenis asuransi merupakan asuransi sosial. Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk melakukan transformasi lembaga asuransi khususnya untuk asuransi sosial dengan ditetapkannya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Walaupun keberlakuan UU BPJS masih 3 tahun lagi, format kelembagaan untuk pengejawantahan UU ini perlu segera di persiapkan melalui perubahan bentuk kelembagaan asuransi social.
4. Pembentukan Asuransi Kredit Daerah Kesanggupan bank memberikan Kredit Usaha Rakyat tidak terlepas ketersediaan lembaga penjaminan milik pemerintah seperti Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO) yang menjadi penjamin jika debitur mikro dan kecil mengalami gagal bayar. Kontribusi ASKRINDO atas biaya gagal bayar ini sebesar 70 persen dan sisanya tanggungan bank pelaksana. Terobosan ini untuk menanggulangi kendala usaha kecil dan mikro mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan khususnya perbankan karena kewajiban menyediakan jaminan fisik atau aset calon debitur. Asuransi sejenis di daerah perlu didorong dikembangkan dalam rangka penguatan industry kecil dan menengah untuk mendorong peningkatan perekonomian dan daya saing domestik.

5. Financial Literacy (Advokasi dan Edukasi)

Untuk produk perbankan, BI bekerjasama dengan bank-bank sudah melakukan proses edukasi baik melalui media masa cetak atau elektronik maupun dalam bentuk pertemuan masa seperti seminar atau workshop. Hal ini perlu dilakukan untuk produk lembaga keuangan non bank yang notabene belum banyak diminati oleh masyarakat. Peluncuran produk seperti asuransi social dapat menjadi ikon dalam rangka advokasi dan edukasi pada masyarakat.

Dampak APEC *Financial Inclusion* terhadap Daya Saing Industri

Dampak peningkatan pengeluaran pada lembaga keuangan bukan bank dapat mempengaruhi faktor produksi melalui pembayaran upah. Dilihat secara keseluruhan, dampak penambahan pengeluaran pada lembaga keuangan bukan bank lebih mempengaruhi tenaga kerja dibandingkan bukan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan bukan bank bersifat *labor intensive*. Nilai multiplier tertinggi terdapat pada lembaga asuransi yang mempunyai multiplier 0.33 yang berarti peningkatan pengeluaran sebesar Rp 1 pada lembaga asuransi akan meningkatkan pendapatan tenaga kerja sebesar Rp 0.33. Relatif besarnya dampak lembaga dana asuransi dibandingkan lembaga bukan bank lainnya menunjukkan bahwa lembaga asuransi memiliki daya jangkauan yang lebih luas dibandingkan lembaga keuangan bukan bank lainnya. Pada faktor produksi bukan tenaga kerja, multiplier terbesar terjadi pada lembaga asuransi dengan nilai multiplier sebesar 0.19.

Tabel 5.1. Multiplier Investasi Lembaga Keuangan Bukan Bank terhadap Faktor Produksi

Lembaga Keuangan Bukan Bank	Faktor Produksi	
	Tenaga Kerja	Bukan Tenaga Kerja
Asuransi	0.1912	0.3256
Dana Pensiun	0.1543	0.2961
Pegadaian	0.1690	0.2793
Perusahaan Pembiayaan	0.1640	0.3032

Sumber: Data Diolah

Dampak peningkatan pengeluaran lembaga keuangan bukan bank terhadap perekonomian dapat dilihat dampaknya pada komoditas. Komoditas dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu komoditas primer yang meliputi pertanian dan pertambangan; komoditas sekunder yang meliputi pengolahan migas, non migas, listrik, gas dan air serta bangunan; dan komoditas tersier yang meliputi perdagangan, pengangkutan, keuangan dan sektor lainnya.

Pada komoditas primer, peningkatan pengeluaran pada lembaga keuangan bukan bank akan memberikan dampak lebih besar pada komoditas pertanian dibandingkan pada komoditas pertambangan. Perubahan pengeluaran pada lembaga asuransi mempunyai dampak pada komoditas pertanian dengan nilai

multiplier 0.17. Hal ini menunjukkan lembaga asuransi sudah mulai merambah komoditas pertanian lebih luas dibandingkan lembaga keuangan bukan bank lainnya. Sedangkan pada komoditas pertambangan, lembaga dana pensiun mempunyai dampak yang paling besar dengan nilai multiplier sebesar 0,07 yang berarti bahwa peningkatan pengeluaran pada dana pensiun atau perusahaan pembiayaan sebesar Rp 1 akan meningkatkan pendapatan pada komoditas pertambangan sebesar Rp 0,07.

Tabel 5.2. Multiplier Pengeluaran Lembaga Bukan Bank terhadap Komoditas Primer

Lembaga Keuangan Bukan Bank	Sektor Primer	
	Pertanian	Pertambangan
Asuransi	0.1659	0.0655
Dana Pensiun	0.1251	0.0671
Pegadaian	0.1490	0.0538
Perusahaan Pembiayaan	0.1360	0.0663

Sumber: Data Diolah

Pada sektor sekunder, dampak terbesar peningkatan pengeluaran lembaga keuangan bukan bank terjadi pada sektor pengolahan non migas terutama dari lembaga asuransi dengan nilai multiplier sebesar 0,59 yang berarti peningkatan pengeluaran pada lembaga asuransi sebesar Rp 1 akan meningkatkan pendapatan sektor pengolahan non migas sebesar Rp 0,59.

Tabel 5.3. Multiplier Pengeluaran Lembaga Bukan Bank terhadap Komoditas Sekunder

Lembaga Keuangan Bukan Bank	Komoditas Sekunder		
	Ind. Pengolahan	LGA	Bangunan
Asuransi	0.5869	0.0195	0.3355
Dana Pensiun	0.5153	0.0143	0.3935
Pegadaian	0.5106	0.0177	0.2639
Perusahaan Pembiayaan	0.5335	0.0158	0.3756

Sumber: Data Diolah

Pada sektor jasa, dampak terbesar terjadi pada komoditas keuangan yang memiliki nilai multiplier antara 0,07 hingga 0,09. Dilihat dari lembaga keuangan bukan bank, dampak terbesar terjadi pada peningkatan pengeluaran pada sektor asuransi dengan nilai multiplier sebesar 0,09 yang menunjukkan jika terjadi peningkatan pengeluaran sebesar Rp 1 pada lembaga asuransi maka akan meningkatkan penerimaan sektor perdagangan sebesar Rp 0,09. Dampak pada sektor keuangan relatif besar dibandingkan sektor jasa lainnya seperti

perdagangan dan pengangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa jangkauan lembaga keuangan bukan bank masih terbatas pada sektor keuangan di Indonesia.

Tabel 5.4. Multiplier Pengeluaran Lembaga Bukan Bank terhadap Komoditas Tersier

Lembaga Keuangan Bukan Bank	Komoditas Tersier			
	Perdagangan, Hotel, dan restoran	Pengangkutan dan Komunikasi	Keuangan	Lainnya
Asuransi	0.0520	0.0586	0.0903	0.0996
Dana Pensiun	0.0349	0.0416	0.0716	0.0696
Pegadaian	0.0478	0.0533	0.0802	0.0905
Perusahaan Pembiayaan	0.0396	0.0463	0.0766	0.0777

Sumber: Data Diolah

Dampak APEC *Financial Inclusion* terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Kota dan Desa (Miskin dan Tidak Miskin)

Dampak peningkatan pengeluaran lembaga keuangan bukan bank terhadap institusi melalui faktor produksi terutama tenaga kerja. Dampak peningkatan pengeluaran lembaga keuangan bukan bank terhadap institusi relatif beragam antar institusi. Pada institusi perusahaan bukan keuangan, peningkatan pengeluaran pada perusahaan pembiayaan memberi dampak terbesar dengan nilai multiplier sebesar 0,76 yang berarti peningkatan pengeluaran sebesar Rp 1 akan meningkatkan pendapatan perusahaan bukan keuangan sebesar Rp 0,76. Pada rumah tangga, secara keseluruhan dampak peningkatan pengeluaran pada lembaga keuangan bukan bank akan memberi dampak yang paling besar pada keluarga tidak miskin baik di desa maupun di kota. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga tidak miskin mempunyai akses yang lebih besar terhadap lembaga keuangan bukan bank dibandingkan keluarga miskin. Dilihat dari jenis lembaga keuangan bukan banknya, lembaga asuransi memiliki dampak yang paling besar terutama pada keluarga tidak miskin baik di desa maupun di kota. Sedangkan dampaknya terhadap rumah tangga miskin baik di desa maupun di kota relatif sama untuk semua jenis lembaga keuangan bukan bank.

Tabel 5.5. Multiplier Pengeluaran Lembaga Keuangan Bukan Bank terhadap Institusi

Lembaga Keuangan Bukan Bank	Institusi				
	Perusahaan Bukan Keuangan	Rumah Tangga			
		Desa		Kota	
		Miskin	Tidak Miskin	Miskin	Tidak Miskin
Asuransi	0.4836	0.0063	0.1709	0.0088	0.4115
Dana Pensiun	0.7570	0.0052	0.1181	0.0035	0.2420
Pegadaian	0.3094	0.0067	0.1580	0.0034	0.3910
Perusahaan Pembiayaan	0.7639	0.0055	0.1331	0.0036	0.2901

Sumber: Data Diolah

APEC dan Peningkatan Kredit Modal Kerja - *Shock* Perubahan Premi Asuransi

Besarnya *shock* yang akan disimulasikan untuk mengetahui bagaimana perubahan premi asuransi perusahaan *joint venture* asuransi negara APEC terhadap kesejahteraan rumah tangga dan daya saing per sektor. Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data FSAM 2005, sedangkan besaran *shock* yang digunakan berdasarkan data tahun 2009. Hal ini dikarenakan database FSAM *update* hanya pada tahun 2005 dan data pendapatan premi yang secara lengkap tersedia adalah tahun 2009. Pada tahun 2009, total pendapatan premi dari perusahaan *joint venture* untuk jenis usaha asuransi kerugian dan reasuransi adalah sebesar 712,435 juta rupiah.

Tabel 5.6. Pendapatan Premi Neto Perusahaan Patungan (*Joint venture*) Usaha Asuransi Kerugian dan Reasuransi Tahun 2009

Perusahaan Patungan (Usaha Asuransi Kerugian dan Reasuransi)	Pendapatan Premi Neto (Juta Rupiah)	Asal Negara	Grouping
AON Indonesia	18,673	Amerika Serikat	APEC
Chartis	148,491	Amerika Serikat	APEC
China Taiping	14,449	China	APEC
Asuransi Hanjin	20,465	Korea	APEC
Kurnia Insurance	20,165	Malaysia	APEC
LIG	9,168	Korea	APEC
MAA	9,585	Malaysia	APEC
MSIG	112,317	Jepang	APEC
Asuransi Permata	24,735	Jepang	APEC
Qbe Pool	30,804	Australia	APEC
Samsung Tugu	8,961	Korea	APEC
Sompo Japan	38,255	Jepang	APEC
Asuransi Tokio	256,367	Jepang	APEC
TOTAL	712,435		

Sumber: Bapepam LK, 2009

Selain perusahaan asuransi dengan jenis asuransi kerugian dan reasuransi, di Indonesia terdapat perusahaan *joint venture* dengan jenis usaha asuransi jiwa, pialang asuransi, dan asuransi jiwa syariah yang berasal dari negara APEC pada tahun 2009. Besarnya pendapatan premi neto yang berasal dari perusahaan asuransi jiwa adalah 5,284,774 juta rupiah. Perusahaan asuransi *joint venture* tersebut berasal dari USA, Malaysia, Singapura, Cina, dan Kanada.

Tabel 5.7. Pendapatan Premi Neto Perusahaan Patungan (*Joint venture*) Usaha Asuransi Jiwa Tahun 2009

Perusahaan Patungan (Asuransi Jiwa)	Pendapatan Premi Neto (Juta Rupiah)	Asal Negara	Grouping
Asuransi Cigna	793,786	Amerika Serikat	APEC
CIMB Sun life	17,187	Malaysia	APEC
Commonwealth Life	671,488	Australia	APEC
Great Eastern Life	153,859	Singapura dan Malaysia	APEC
MAA Life	30,783	Malaysia	APEC
Asuransi Jiwa Manulife	3,002,083	China	APEC
Asuransi Sun Life	612,444	Kanada	APEC
UOB Life Sun	3,144	Singapura	APEC
TOTAL	5,284,774		

Sumber: Bapepam LK, 2009

Perusahaan yang berasal dari negara Malaysia dan Cina yang menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk perusahaan *joint venture* untuk usaha asuransi jiwa syariah memiliki pendapatan premi netto sebesar 33,995 juta rupiah pada tahun 2009. Perusahaan *joint venture* tersebut adalah perusahaan asuransi Jiwa Takaful dan Asuransi Jiwa Manulife.

Tabel 5.8. Pendapatan Premi Neto Perusahaan Patungan (*Joint venture*) Usaha Asuransi Jiwa Syariah Tahun 2009

Perusahaan Patungan (Asuransi Jiwa Syariah)	Pendapatan Premi Neto (Juta Rupiah)	Asal Negara	Grouping
Asuransi Jiwa Takaful	32,242	Malaysia	APEC
Asuransi Jiwa Manulife	1,753	China	APEC
TOTAL	33,995		

Sumber: Bapepam LK, 2009

Amerika Serikat merupakan salah satu negara asal perusahaan asuransi yang banyak menanamkan modalnya di Indonesia dalam bentuk perusahaan *joint venture* termasuk di bidang usaha asuransi pialang asuransi dan reasuransi. Pada tahun 2009, total pendapatan premi kedua jenis usaha asuransi tersebut adalah sebesar 1,263,809 juta rupiah.

Tabel 5.9. Pendapatan Premi Neto Perusahaan Patungan (*Joint venture*) Usaha Pialang Asuransi dan Reasuransi Tahun 2009

Perusahaan Patungan (Usaha Pialang Asuransi dan Reasuransi)	Pendapatan Premi Neto (Juta Rupiah)	Asal Negara	Grouping
AON Indonesia	378,515	Amerika Serikat	APEC
Marsh Indonesia	854,431	Amerika Serikat	APEC
TOTAL	1,263,809		

Sumber: Bapepam LK, 2009

Berdasarkan jenis usaha asuransinya, maka total pendapatan premi perusahaan *joint venture* yang ada di Indonesia dan berasal dari negara APEC pada tahun 2009 adalah sebesar 7,295,013 juta rupiah. Besaran angka tersebut yang akan digunakan sebagai justifikasi besaran *shock* untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan pendapatan premi asuransi yang ada di Indonesia yang berasal dari negara APEC terhadap kesejahteraan rumah tangga dan sektor produksi.

Tabel 5.10. *Share* Pendapatan Premi Perusahaan *Join Venture* Asuransi Negara Anggota APEC Tahun 2009

Asuransi	Total Premi Perusahaan <i>Joint venture</i> Asuransi Negara APEC (Juta Rupiah)
Perusahaan Patungan (Usaha Asuransi Kerugian dan Reasuransi)	712,435
Perusahaan Patungan (Asuransi Jiwa)	5,284,774
Perusahaan Patungan (Asuransi Jiwa Syariah)	33,995
Perusahaan Patungan (Usaha Pialang Asuransi dan Reasuransi)	1,263,809
TOTAL	7,295,013

Sumber: Bapepam LK, 2009

Dampak Perubahan Pendapatan Premi Perusahaan *Joint venture* terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Dampak terhadap rumah tangga akibat *shock* pada perubahan premi perusahaan *joint venture* asuransi negara APEC merupakan dampak langsung melalui pembayaran ke rumah tangga. Ekspansi kapital perusahaan-perusahaan sebagai akibat peningkatan premi perusahaan *joint venture* asuransi dari Negara APEC menyebabkan perusahaan mengalami peningkatan kemampuan pembiayaan yang pada gilirannya akan meningkatkan investasi berupa bangunan pabrik atau gudang pada industri pengolahan dan investasi di sektor properti bagi sektor bangunan. Efek dari peningkatan produktivitas di sektor riil tersebut akan berdampak pada peningkatan permintaan input tenaga kerja khususnya

terhadap rumah tangga tidak miskin di pedesaan dan rumah tangga miskin diperkotaan. Oleh karena itu dari segi nilai, dampak terbesar *shock* peningkatan kesejahteraan dialami oleh rumah tangga miskin di kota diikuti tidak miskin pedesaan. Berdasarkan analisis nilai multiplier pada Tabel 5.13, multiplier tertinggi terjadi pada sektor pengolahan non migas dan sektor bangunan. Umumnya masyarakat tidak miskin di pedesaan bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan masyarakat miskin di perkotaan bekerja sebagai buruh di pengolahan non migas. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan didominasi oleh rumah tangga pedesaan tidak miskin sebesar 0.16 persen dan rumah tangga perkotaan yang miskin sebesar 0.25 persen. Transmisi ke pendapatan rumah tangga terjadi melalui interaksi di pasar tenaga kerja yaitu penerimaan upah dan gaji ke rumah tangga.

Tabel 5.11. Dampak *Shock* Pendapatan Premi Asuransi *Perusahaan Joint Venture* terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Institusi	Kategori		Dampak	Awal	Akhir	%
Rumah Tangga	Desa	Miskin	45.95	46,730.99	46,776.94	0.10
		Tidak Miskin	1,246.55	755,579.41	756,825.95	0.16
	Kota	Miskin	64.19	25,720.23	25,784.41	0.25
		Tidak Miskin	3,001.49	1,363,278.11	1,366,279.59	0.22

Dampak Perubahan Pendapatan Premi Perusahaan *Joint venture* terhadap Komoditas Domestik pada Setiap Sektor Produksi

Dampak *shock* di lembaga asuransi terhadap komoditas domestik untuk setiap sektor produksi dapat melalui dua jalur. Jalur pertama adalah melalui konsumsi komoditas domestik rumah tangga pada setiap sektor produksi sedangkan jalur kedua adalah melalui pembayaran klaim terhadap komoditas domestik pada setiap sektor produksi.

Apabila dibandingkan dampak pada perubahan premi perusahaan *joint venture* asuransi negara APEC terhadap komoditas domestik pada sektor pertanian dan pertambangan, dampak terhadap komoditas domestik sektor pertanian jauh lebih besar yaitu 0.18 persen. Dampak ini melalui transmisi konsumsi institusi rumah tangga. Proporsi terbesar konsumsi rumah tangga adalah pada komoditi primer yaitu sektor pertanian.

Tabel 5.12. Dampak *Shock* Pendapatan Premi Asuransi *Perusahaan Joint Venture* terhadap Komoditas Domestik Sektor Pertanian dan Pertambangan

Komoditas Domestik	Dampak	Awal	Akhir	%
Pertanian	1,210.08	659,448.25	660,658.32	0.18
Pertambangan	477.76	398,893.83	399,371.59	0.12

Industri pengolahan terutama non migas mendapatkan dampak yang relatif besar akibat perubahan premi perusahaan *joint venture* asuransi negara APEC yaitu sebesar 0.17 persen. Peningkatan pembiayaan investasi ditransmisikan ke agregat makro melalui akumulasi kapital dan kemampuan sektor produksi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mengkonsumsi komoditas input. Hal ini yang mendasari terjadinya peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin di perkotaan yang pada umumnya bermata pencaharian sebagai buruh di industri pengolahan.

Tabel 5.13. Dampak *Shock* Pendapatan Premi Asuransi *Perusahaan Joint Venture* terhadap Komoditas Domestik Sektor Industri Pengolahan

Komoditas Domestik	Dampak	Awal	Akhir	%
Industri Pengolahan	4,280.85	2,476,945.47	2,481,226.33	0.17

Dampak terbesar akibat dari *shock* di lembaga asuransi adalah komoditas domestik untuk sektor bangunan, keuangan dan industri pengolahan. Komoditas domestik untuk sektor bangunan mendapatkan *shock* terbesar karena terdapat transfer kapital dari lembaga asuransi. Selain komoditas untuk sektor bangunan, komoditas domestik di sektor industri pengolahan juga mendapatkan transfer dari lembaga asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas domestik pada sektor bangunan dan industri pengolahan mempunyai kaitan yang erat dengan lembaga asuransi. Sedangkan komoditas pada sektor keuangan mendapatkan dampak yang besar karena kaitannya dengan komoditas sektor bangunan melalui jasa sewa properti yang merupakan sub sektor keuangan (Bank Indonesia, 2009).

Tabel 5.14. Dampak *Shock* Pendapatan Premi Asuransi *Perusahaan Joint Venture* terhadap Komoditas Domestik Sektor Listrik, Gas & Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel & Restoran

Komoditas Domestik	Dampak	Awal	Akhir	%
Listrik, Gas & Air Bersih	142.23	88,893.50	89,035.74	0.16
Bangunan	2,447.14	578,441.81	580,888.95	0.42
Perdagangan, Hotel & Restoran	379.29	730,934.64	731,313.93	0.05

Salah satu implikasi yang penting dari dampak perubahan premi perusahaan *joint venture* asuransi negara APEC terhadap komoditas domestik sektor keuangan, bahwa peran sektor keuangan tetap strategis untuk ditingkatkan karena mampu menghasilkan spillover yang positif terhadap kegiatan investasi secara keseluruhan. Dalam hal ini pengembangan sektor keuangan tersebut perlu memperhatikan akses yang lebih luas pada seluruh kelompok masyarakat sehingga dampak negatif dari segmentasi aksesibilitas sector keuangan dapat diminimalkan. Hal ini akan sejalan dengan butir 8 Paket Kebijakan BI tanggal 29 Desember 2010 mengenai Program Perluasan Akses Kepada Lembaga Keuangan (*Financial Inclusion*) yang diterapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengelolaan keuangan oleh masyarakat secara bertahap, peningkatan penggunaan jasa perbankan (kredit dan simpanan) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri.

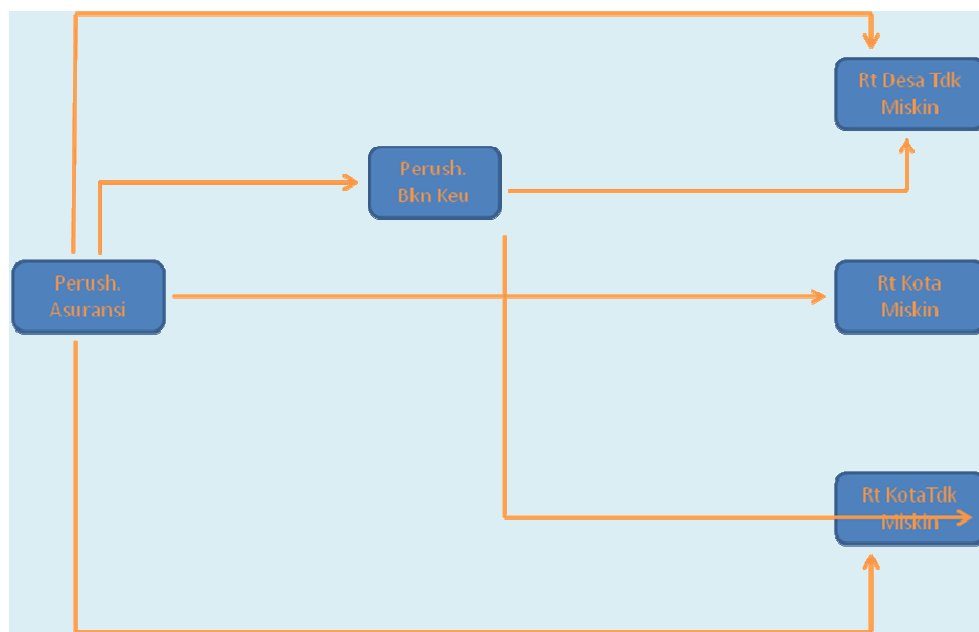
Tabel 5.15. Dampak *Shock* pada Pendapatan Premi Asuransi *Perusahaan Joint Venture* terhadap Komoditas Domestik Sektor Pengangkutan & Komunikasi, Keuangan dan Sektor Lainnya.

Komoditas Domestik	Dampak	Awal	Akhir	%
Pengangkutan & Komunikasi	427.43	398,425.51	398,852.94	0.11
Keuangan	658.65	352,188.05	352,846.70	0.19
Sektor Lainnya	726.48	482,637.87	483,364.36	0.15

Structural Path Analysis berguna untuk melacak interaksi transmisi suatu shock terhadap variabel lain sehingga dapat diketahui apakah shock tersebut bersifat langsung atau melalui variabel lain. Seperti transmisi dari perusahaan asuransi kepada institusi rumah tangga, selain langsung juga dapat melalui perusahaan bukan keuangan (Gambar 5.1). Dari Tabel 5.1.6 terlihat bahwa dampak shock pada perusahaan asuransi terhadap rumah tangga masih didominasi oleh dampak langsung baik itu rumah tangga miskin dan tidak miskin di desa dan di kota. Hal ini menunjukkan pembayaran premi terhadap rumah tangga mempunyai dampak yang lebih besar dibandingkan melalui pembayaran ke rumah tangga melalui perusahaan bukan keuangan.

Tabel 5.1.6. Jalur Transmisi ke Rumah tangga

Case	Origin of Shock i	Destination J	Global Influence GI	Elementary Path (i --> j)	Direct Influence DI	Path Multiplier	Total Influence TI	TI/GI %
1	Perush. Asuransi	Rt Desa Tdk Miskin	0.171	Perush. Asuransi, RT Desa Tdk Miskin	0.054	1.252	0.068	39.6
				Perush. Asuransi, Perush Bkn Keu, RT Desa Tdk Miskin	0.001	1.430	0.002	1.10
2	Perush. Asuransi	Rt Kota Miskin	0.009	Perush. Asuransi, RT Kota Miskin	0.005	1.044	0.005	57.7
3	Perush. Asuransi	Rt Kota Tdk Miskin	0.411	Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin	0.212	1.375	0.295	70.9
				Perush. Asuransi, Perush Bkn Keu, RT Kota Tdk Miskin	0.050	1.550	0.007	1.80



Gambar 5.1. Jalur Transmisi untuk Rumah Tangga

Jalur transmisi dari shock terhadap perusahaan asuransi pada sektor domestik tidak langsung akan tetapi melalui rumah tangga. Pada sektor pertanian, transmisi dari perusahaan asuransi umumnya melalui rumah tangga tidak miskin baik di desa maupun di kota. Hal yang menarik adalah bahwa dampak terbesar

melalui rumah tangga kota tidak miskin, bukan melalui rumah tangga desa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kota tidak miskin lebih terekspos terhadap perusahaan asuransi dibandingkan masyarakat desa.

Tabel 5.1.7. Jalur Transmisi untuk Komoditi Domestik

Case	Origin Shock i	of j	Destination	Global Influence GI	Elementary Path (i --> j)	Direct Influence DI	Path Multiplier	Total Influence TI	TI/GI %
1	Perush. Asuransi	Pertanian		0.166	Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, Pertanian	0.023	1.728	0.0039	23.6
					Perush. Asuransi, RT Desa Tdk Miskin, Pertanian	0.008	1.607	0.013	7.5
					Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, Ind. Pengol, S. IPnmf, Pertanian	0.004	2.424	0.011	6.5
					Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, Ind. Pengol, S. IPnmf, Pertanian	0.001	2.424	0.003	2.1
					Perush. Asuransi, RT Desa Tdk Miskin, Ind. Pengol, S. IP nmf, Pertanian	0.001	2.325	0.003	1.6
					Perush. Asuransi, RT Kota Miskin, Pertanian	0.001	1.427	0.002	1.0
2	Perush. Asuransi	Pertambangan		0.066	Perush. Asuransi, Rt Kota Tdk Miskin, Ind. Pengol, Sektor Ind. Pengol nonmigas formal, Pertambangan	0.002	2.165	0.005	7.7
					Perush. Asuransi, Perush. Bkn Keu, Kapital Perush Bkn Keu, Pertambangan	0.001	1.684	0.002	2.8
3	Perush. Asuransi	Industri Pengolahan		0.587	Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, IP	0.066	2.013	0.134	22.8
					Perush Asuransi, Perush. Bkn Keu, C. PBK, IP	0.015	2.361	0.034	5.8
					Perush Asuransi, Rt Desa Tdk Miskin, IP	0.017	1.913	0.033	5.7
4	Perush. Asuransi	LGA		0.020	Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, LGA	0.003	1.515	0.004	20.6

5	Perush. Asuransi	Bangunan	0.335	Perush. Asuransi, Perush Bkn Keu, Capital Perush Bkn Keu, Bangunan	0.081	1.573	0.127	37.9
				Perush. Asuransi, C. Asuransi, IF Lainnya, K PBK, Bangunan	0.025	1.784	0.045	13.5
				Perush. Bkn Keu, C. Asuransi, IF Modal Saham & Penyertaan, C. PBK, Bangunan	0.02	1.577	0.032	9.6
6	Perush. Asuransi	PHR	0.052	Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, PHR	0.015	1.436	0.022	41.6
				Perush. Asuransi, RT Desa Tdk Miskin, PHR	0.004	1.325	0.022	10.6
7	Perush. Asuransi	Pengangkutan & Komunikasi	0.059	Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, Angk & Kom	0.012	1.504	0.018	30.6
				Perush. Asuransi, RT Desa Tdk Miskin, Angk & Kom	0.003	1.390	0.005	7.9
				Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, PHR, S PHR f, Angk & Kom	0.001	1.565	0.002	2.9
8	Perush. Asuransi	Keuangan	0.090	Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, Keu	0.011	1.678	0.018	20.0
				Perush. Asuransi, RT Desa Tdk Miskin, Keu	0.003	1.549	0.005	5.2
				Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, PHR, S PHR f, Keu	0.002	1.741	0.004	4.3
				Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, IP, S IP nmf, Keu	0.001	2.426	0.003	3.2
9	Perush. Asuransi	Sektor Lainnya	0.100	Perush. Asuransi, RT Kota Tdk Miskin, Sektor Lainnya	0.023	1.551	0.036	35.9
				Perush. Asuransi, RT Desa Tdk Miskin, Sektor Lainnya	0.007	1.439	0.01	10.0
				Perush. Asuransi, Perush Bkn Keu, C Perush Bkn Keu, Sektor Lainnya	0.001	1.841	0.003	2.6

Dampak shock pada perusahaan asuransi terbesar pada industri pengolahan. Dilihat dari transmisinya, jalur yang terbesar hingga mencapai industri pengolahan adalah melalui rumah tangga tidak miskin di kota yang dapat

dijelaskan bahwa masyarakat kota tidak miskin merupakan salah satu konsumen penting produk-produk industri pengolahan. Sedangkan rumah tangga tidak miskin di kota merupakan konsumen penting bagi perusahaan asuransi.

Berbeda dengan sektor pertanian dan industri pengolahan, dampak terhadap sektor bangunan akibat shock pada perusahaan asuransi tidak melalui rumah tangga melainkan melalui perusahaan bukan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan rumah tangga relatif kecil dibandingkan perusahaan bukan keuangan.

Pada Tabel 5.1.8 dijelaskan dampak shock transfer pendapatan dari luar negeri kepada perusahaan asuransi sebesar 7,3 trilyun dan dampak shock pada kredit modal kerja sebesar 27 trilyun masing-masing pada faktor produksi, rumah tangga dan sektor produksi domestik.

Dampak terbesar shock pada kredit modal kerja pada faktor produksi terjadi di faktor produksi bukan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan asuransi lebih bersifat capital intensive.

Dampak pada rumah tangga, dari sisi nilai terlihat bahwa dampak terbesar terjadi pada rumah tangga tidak miskin baik di desa maupun di kota sedangkan dari sisi persentase dialami oleh rumah tangga tidak miskin di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan peningkatan modal kerja akan lebih berdampak pada rumah tangga tidak miskin baik di kota maupun di desa.

Pada sektor produksi domestik, dampak shock pada kredit modal kerja terbesar adalah pada sektor industri pengolahan bila dilihat dari sisi nilai sedangkan persentase peningkatan terbesar dialami oleh sektor bangunan. Peningkatan pada sektor industri pengolahan menunjukkan penyaluran kredit modal kerja lebih banyak pada sektor ini. Sedangkan dampak pada sektor bangunan dapat dijelaskan bahwa penyaluran kredit modal kerja digunakan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sektor bangunan seperti pembangunan rumah, pabrik dan lain-lain. Sedangkan untuk sektor pertanian juga berdampak besar akibat peningkatan kredit modal kerja karena salah satu sektor yang diprioritaskan untuk kredit modal kerja adalah sektor pertanian.

Tabel 5.1.8. Dampak *Shock* pada Pendapatan Premi Asuransi *Perusahaan Joint Venture* dan Kredit Modal Kerja terhadap Komoditas Domestik

	Shock Transfer Pendapatan dari LN				Shock Kredit Modal Kerja		
	Awal	Perubahan	Akhir	%	Perubahan	Akhir	%
Tenaga Kerja	1,487,377.61	1,394.61	1,488,772.23	0.09	5,666.00	1,493,043.62	0.38
Bukan Tenaga Kerja	1,346,454.27	2,374.93	1,348,829.20	0.18	11,653.42	1,358,107.68	0.87
Desa Miskin	46,730.99	45.95	46,776.94	0.10	196.13	46,927.11	0.42
Desa Tidak Miskin	755,579.41	1,246.55	756,825.95	0.16	3,624.16	759,203.56	0.48
Kota Miskin	25,720.23	64.19	25,784.41	0.25	117.83	25,838.05	0.46
Kota Tidak Miskin	1,363,278.11	3,001.49	1,366,279.59	0.22	5,902.85	1,369,180.95	0.43
Pertanian	659,448.25	1,210.08	660,658.32	0.18	4,617.32	664,065.57	0.70
Pertambangan	398,893.83	477.76	399,371.59	0.12	2,704.21	401,598.04	0.68
Industri Pengolahan	2,476,945.47	4,280.85	2,481,226.33	0.17	21,594.06	2,498,539.53	0.87
LGA	88,893.50	142.23	89,035.74	0.16	491.40	89,384.90	0.55
Bangunan	578,441.81	2,447.14	580,888.95	0.42	16,211.45	594,653.26	2.80
PHR	730,934.64	379.29	731,313.93	0.05	1,032.26	731,966.91	0.14
Pengangkutan & Komunikasi	398,425.51	427.43	398,852.94	0.11	1,332.94	399,758.45	0.33
Keuangan	352,188.05	658.65	352,846.70	0.19	2,481.95	354,670.00	0.70
Sektor Lainnya	482,637.87	726.48	483,364.36	0.15	2,119.18	484,757.05	0.44

